

Artinya;

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisa’: 7).

Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 176 menjelaskan bahwa :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).⁸ Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa’: 176).

⁸ Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

a. Asas Ijbari

Asas ijbari menurut etimologi artinya paksaan yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hukum waris ini terjadi peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak dan menghalang-halangi terjadi peralihan tersebut. Kemudian dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak. Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :

1. Dari segi peralihan harta
2. Dari segi jumlah harta yang beralih,
3. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.²⁶

Asas ijbari dalam peralihan dapat dilihat dalam ketentuan dalam surat an-Nisā' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada *nāsib* dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata *nāsib* berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari segi bentuk jumlah yang mana bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau

²⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris slam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 39.

secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.³⁷

2. Macam-Macam Penghalang (*Al-Hijāb*)

Penghalang (*Al-hijāb*) terbagi dua, yakni *Al-hijāb bil washfi* (sifat/julukan), dan *Al-hijāb bi asy-syakhshi* (karena orang lain).

Al-hijāb bil washfi berarti orang yang terkena *hijāb* tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.

Sedangkan *Al-hijāb bi asy-syakhshi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *Al-hijāb bi asy-syakhshi* terbagi dua: *hijāb hirman* dan *hijāb nuqshān*.

Hijāb hirman yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Misalnya, terhalangnya hak waris seorang kakek karena adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu karena adanya anak, terhalangnya hak waris saudara seayah karena adanya saudara kandung, terhalangnya hak waris seorang nenek karena adanya ibu, dan seterusnya.

Adapun *hijāb nuqshan* (pengurangan hak) yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak. Misalnya, penghalangan terhadap

³⁷ Penghalang Warisan (Al-Hujūb), <http://blogcahyo.blogspot.com/2010/03/penghalang-warisan-al-hujub.html>, (01 Juli 2012)

mendapatkan warisan dari orang islam dan orang islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda Rasulullah saw.⁵¹

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (متفقن عليه)

Artinya :

“Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang islam”. (H.R. *Muttafaq ‘Alaih*).⁵²

d. Karena Hilang Tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu keberadaan dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati *hukmi*) dengan sendirinya tidak mewaris (*mafqud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.⁵³

e. Berlainan Tempat (Negera)

Yang dimaksud perbedaan tempat (negara) adalah berlainan pemerintahan yang diikuti oleh waris dan *muwāris*.⁵⁴ Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah, antara pewaris dan ahli waris bertempat tinggal di dua Negara yang berbeda. Para ulama' ahli waris sepakat bahwa berlainan Negara akan tetapi dua Negara tersebut sama-sama Negara Islam tidak menjadi penghalang kewarisan.⁵⁵

⁵¹ Muhammad Ali As-Shobuni, *Hukum Waris Syariat Islam*, (Bandung: Diponorogo, 1995), 53.

⁵² Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhory, *Matan al-Bukhory*, (Bairut: Maktabah Wa Maṭba'ah, t.t.), 170

⁵³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 110-112

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawāris*, (Semarang: Pusaka Rizki Putra, 2010), 46.

⁵⁵ A.Rahmad Budiono, *Pembaruan hukum Kewarisan Islam di Indonesia* , 13

Sedangkan 10 ahli waris dari golongan perempuan:

- 14) Anak perempuan
- 15) Cucu perempuan dari anak laki-laki, terus ke bawah asal yang mempertalikannya laki-laki
- 16) Ibu
- 17) Nenek Shohih terus ke atas (ibunya ibu)
- 18) Nenek Shohih terus ke atas (ibunya ayah)
- 19) Saudara perempuan sekandung
- 20) Saudara perempuan seayah
- 21) Saudara perempuan seibu
- 22) Istri
- 23) Mu'tiqah (majikan wanita yang telah memerdekakan budaknya)⁵⁷

Selanjutnya, apabila semua ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, baik laki-laki maupun perempuan, maka hanya lima saja yang mendapat bagian, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan.⁵⁸

Adapun macam-macam pewaris itu ada dua, yaitu:

- 1) Ahli waris nasabiyah, karena hubungan darah.
- 2) Ahli waris sababiyah, timbul karena:
 - Perkawinan yang sah (al-musaharah)

⁵⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), 58

⁵⁸ Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1979), 17

- $\frac{1}{2}$ kalau hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki
- $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih tidak bersama anak laki-laki

2) Cucu perempuan garis laki-laki, berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ jika sendirian, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub.
- $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, tidak bersama cucu laki-laki dan tidak mahjub
- $\frac{1}{6}$ sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ jika bersama anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki.

3) Ibu, berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak atau cucu atau saudara dua orang atau lebih
- $\frac{1}{6}$ jika ada far'u waris atau bersama dua orang saudara atau lebih.
- $\frac{1}{3} \times$ sisa, dalam masalah ghorrowain, yaitu apabila ahli waris terdiri dari suami/isteri, ibu dan bapak.

4) Bapak, berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki
- $\frac{1}{6} +$ sisa, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki
- Jika bapak bersama ibu:
- Masing-masing $\frac{1}{6}$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang/lebih.

- $\frac{1}{3}$ untuk ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih.
- Ibu menerima $\frac{1}{3}$ sisa, bapak sisanya setelah diambil untuk suami/isteri.

5) Nenek, jika tidak mahjub berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ jika seorang
- $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

6) Kakek, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- $\frac{1}{6} \mp$ sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa anak laki-laki
- $\frac{1}{6}$ atau muqosamah (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
- $\frac{1}{3}$ atau muqasamah bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.

7) Saudara perempuan sekandung, jika tidak mahjub, berhak menerima bagian:

- $\frac{1}{2}$ jika seorang, dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung
- $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

8. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Kematian seseorang dianggap sebagai sebab masa berlakunya hukum kewarisan seseorang jika ia meninggalkan sejumlah harta miliknya dan memiliki ahli waris. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama dan menjadi ketentuan yang membedakan dengan hukum seperti doktrin hukum wakaf dan hibah yang hanya terjadi ketika seseorang hidup dalam rangka transaksi amal kebajikan keagamaan. Sedangkan wasiat walaupun masa berlakunya terjadi setelah kematian seseorang jika ia telah berwasiat, tetap bersyarat dengan adanya penunjukan pewasiat ketika hidupnya. Jadi transaksi amal kebajikan keagamaan ini juga dianggap merupakan peristiwa hidup seseorang yang manfaatnya terjadi setelah kematiannya. Maka perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kepada orang yang berhak menerimanya tanpa adanya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara "*ijbārī*", tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta (tirkah) dan ada yang berhak menerimanya.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, meski dalam soal pembagian harta pustaka sekalipun, adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh dalil nash yang lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu, bahkan

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤٠﴾

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁴

Ayat tersebut telah menegaskan bahwa, harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang orang yang meninggal itu. Karena hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan hutang timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berhutang.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, 101-102

Sedangkan wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang supaya akhir hayatnya diakhiri perbuatan-perbuatan (*amāliyah*) kebajikan untuk menambah amal yang telah ada dan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain kedua hal tersebut di atas, yaitu pemenuhan wasiat dan pelunasan hutang waris, ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu biaya penyelenggaraan jenazah yang meliputi biaya memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburkannya. Kemudian setelah semua masalah tersebut selesai barulah pembagian harta warisnya kepada semua ahli warisnya yang berhak menerimanya.

Kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 1, menyebutkan bahwa; kewajiban ahli waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:

- e. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
- f. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- g. Menyelesaikan wasiat pewaris.
- h. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.⁵⁵

Pasal 188 menjelaskan bahwa: Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorang dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 53

permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.⁷⁰

Dengan melihat pasal 175 ayat (1) huruf (d) di atas, maka ahli waris berkewajiban membagi harta waris kepada orang yang berhak setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana termaktub pada pasal 175 ayat (1) huruf (a), (b), (c) kemudian jika telah diselesaikan semua kewajiban-kewajiban di atas sesuai pasal 175 ayat (1) huruf (a), (b), (c) namun diantara ahli waris ada yang tidak menyetujui terhadap permintaan pembagian harta waris, maka ahli waris yang lain dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 188 kompilasi Hukum Islam.

⁷⁰ *Ibid*, 56